



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

# Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERZAL SYAHREZA ASWIR

Jabatan : KETUA
 NHK : 1016659

#### II. DATA HARTA

# A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.050.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 3.248 m2/150 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, WARISAN Rp. 400.000.000
- Tanah Seluas 1.051 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR,
   WARISAN Rp. 100.000.000

### **B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 12.000.000

Rp.

682.000.000

1. MOTOR, YAMAHA FREGO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA		V.	Rp.	40.000.000
D.	SURAT BERHARGA			Rp.	
E.	KAS DAN SETARA KAS	N-	W.	Rp.	30.000.000
F.	HARTA LAINNYA			Rp.	
	Sub Total	al.	al.	Rp.	1.132.000.000
HU	TANG		Ker	Rp.	450.000.000

al al

Catatan:

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara

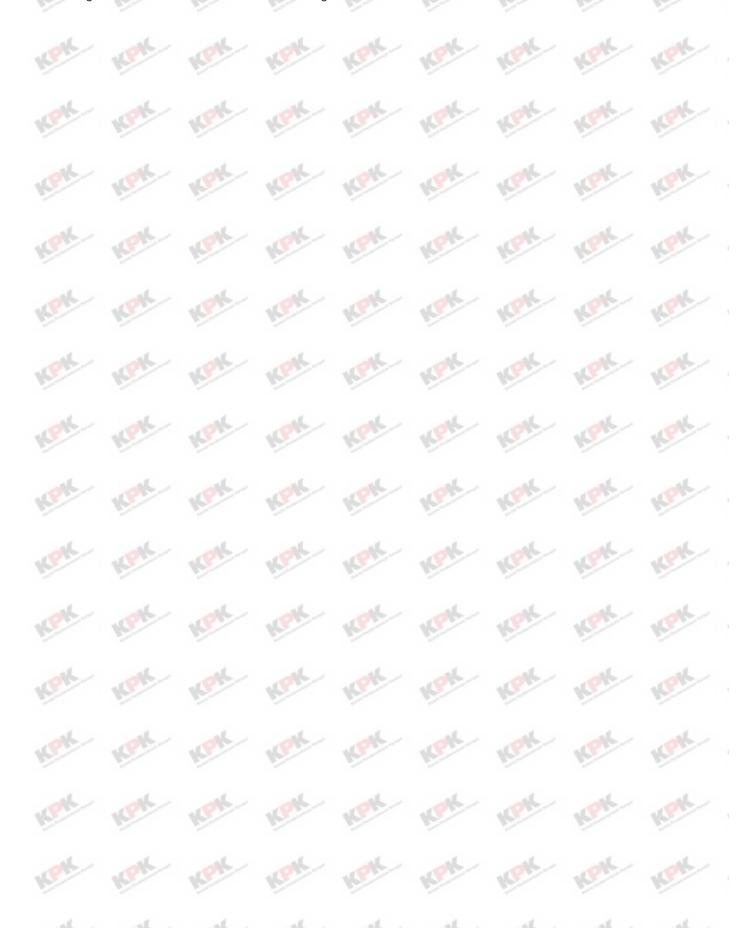






Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.









(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

# Status Verifikasi Administratif Lengkap

**EKSEKUTIF BIDANG** 

**LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)** 

**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUMADI AHMAD

: SEKRETARIS Jabatan

NHK 922073

#### II. DATA HARTA

A. TANAH DAN B	ANGUNAN	OK . OK	Rp.	400.000.000	
1. Tanah dar	1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA				
BANDAR	LAMPUNG , HIBAH DENGAN	I AKTA Rp. 400.000.000	al .	al al	
B. ALAT TRANSP	PORTASI DAN MESIN	VAL.	Rp.	10.000.000	
1. MOTOR,	HONDA GENIO Tahun 2	019, HASIL SENDIRI	Rp.		
10.000.00	0	OK KOK	KPK.	KOK KOK	
C. HARTA BERGE	ERAK LAINNYA		Rp.		
D. SURAT BERHA	ARGA	at at	Rp.	at at	
E. KAS DAN SET	ARA KAS	K	Rp.	5.000.000	
F. HARTA LAINN	YA		Rp.		
Sub Total	KOK KOK K	ble Kole	Rp.	415.000.000	
III. HUTANG	Rp.	400.000.000			
IV. TOTAL HARTA KE	Rp.	15.000 <mark>.00</mark> 0			
		The state of the s			

#### Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.